

PENGARUH KONTEN DIGITAL TERHADAP KEPERCAYAAN PUBLIK PADA KEPOLISIAN DALAM KASUS BEGAL DI KOTA MEDAN

Ainur Nadzirah¹, Annisa Zulaura², Daffa Aulia Baihaqi³,
Grace Mutiara Lovian Sinambela⁴, M. Alfarabi Pratama⁵,
Putri Nasha Althoof⁶, Parlaungan Gabriel Siahaan⁷

¹⁻⁷Program Studi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

zira.7233250005@mhs.unimed.ac.id

ABSTRACT

The digital era has transformed how society shapes opinion toward law enforcement institutions. In Medan City, viral begal (motorcycle robbery) content on social media triggered massive public criticism toward the police, while public trust in Polri continuously declined throughout 2021–2025. This study examines the influence of digital content on public trust in the police regarding begal cases in Medan Tembung District. The study employed a quantitative associative approach with 100 respondents via purposive sampling. Data were collected using a 1–5 Likert Scale questionnaire and analyzed through simple linear regression, t-test, and independent sample t-test. The findings confirmed that digital content has a significant negative effect on public trust ($\beta = -0.413$; $R^2 = 0.684$; $p < 0.001$). A total of 83 percent of respondents fell in the low trust category, and the high-exposure group showed significantly lower trust than the low-exposure group ($t = -24.880$; $p < 0.001$). The police must develop a proactive digital communication strategy to restore public trust.

Keywords: Digital Content, Public Trust, Police

ABSTRAK

Era digitalisasi telah mengubah cara masyarakat membentuk opini terhadap institusi penegak hukum. Di Kota Medan, viralnya konten kasus begal di media sosial memicu kritik masif terhadap kepolisian, sementara kepercayaan publik terhadap Polri terus menurun selama 2021–2025. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh konten digital terhadap kepercayaan publik pada kepolisian dalam kasus begal di Kecamatan Medan Tembung. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan 100 responden melalui purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner Skala Likert 1–5 dan dianalisis melalui regresi linear sederhana, uji t, dan independent sample t-test. Hasil penelitian membuktikan konten digital berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepercayaan publik ($\beta = -0,413$; $R^2 = 0,684$; $p < 0,001$). Sebanyak 83 persen

responden berada dalam kategori kepercayaan rendah, dan kelompok paparan tinggi memiliki kepercayaan jauh lebih rendah dibanding kelompok paparan rendah ($t = -24,880$; $p < 0,001$). Kepolisian perlu membangun strategi komunikasi digital yang proaktif untuk memulihkan kepercayaan publik.

Kata kunci: Konten Digital, Kepercayaan Publik, Kepolisian

A. Pendahuluan

Era digitalisasi telah mengubah secara fundamental cara masyarakat mengonsumsi informasi dan membentuk opini publik. Indonesia mencatat total 230 juta pengguna internet dan 180 juta pengguna media sosial pada tahun 2025, meningkat 26 persen dibandingkan tahun sebelumnya (DataReportal, 2026). Di antara berbagai platform yang ada, TikTok menjadi platform paling populer dengan total unggahan lebih dari 107 juta sepanjang 2024 dan memperoleh lebih dari 17 miliar tanggapan (Indonesia Indicator, 2024). Sejalan dengan perkembangan tersebut, media sosial telah berkembang menjadi platform utama untuk komunikasi dan pertukaran informasi, di mana kemajuan teknologi memungkinkan terjadinya komunikasi yang efisien meskipun jarak fisik individu berjauhan (Tri Haryadi dkk., 2025).

Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial bukan lagi sekadar

sarana hiburan semata, melainkan telah bertransformasi menjadi ruang publik yang secara nyata membentuk persepsi kolektif masyarakat terhadap berbagai isu sosial, termasuk isu keamanan dan kinerja aparat penegak hukum.

Dalam konteks penegakan hukum, kehadiran media sosial sebagai ruang publik digital telah menjadi platform utama bagi masyarakat dalam membentuk persepsi dan opini atas isu-isu hukum, mulai dari penegakan hukum dan kebijakan pemerintah hingga kasus-kasus hukum yang viral (Koestiono dkk., 2025). Media sosial berfungsi ganda: sebagai instrumen penguatan kontrol sosial dan partisipasi hukum masyarakat, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan disinformasi dan pembentukan opini yang bias serta tekanan terhadap independensi lembaga hukum (Koestiono dkk., 2025). Dualisme fungsi inilah yang menjadi persoalan mendasar dalam penelitian ini, khususnya dalam konteks kepercayaan masyarakat

Kota Medan terhadap kepolisian dalam penanganan kasus begal. Teori agenda setting menjadi landasan konseptual yang relevan dalam memahami fenomena ini—media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi aktif menentukan prioritas perhatian khalayak (Efendi dkk., 2023), sehingga algoritma platform digital yang cenderung memprioritaskan konten bernilai emosional tinggi membuat narasi negatif mengenai institusi penegak hukum lebih mudah dan cepat menyebar (Khatimah dkk., 2024).

Kota Medan sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia tidak terlepas dari permasalahan kejahatan jalanan, khususnya tindak pidana begal. Salah satu kasus yang sempat viral terjadi pada Mei 2024, ketika seorang korban berusia 27 tahun mengalami pembacokan oleh komplotan begal di Jalan Pancing, Medan, yang mengakibatkan tangannya harus diamputasi, dan rekaman kejadian tersebut menyebar luas di media sosial (ANTARA News, 2024). Viralnya video tersebut memicu reaksi masif dari warganet yang merasa kesal dan frustrasi dengan maraknya aksi begal di Kota Medan, sehingga

kinerja pihak kepolisian pun langsung menjadi sorotan publik melalui berbagai komentar di platform media sosial (Buka Mata, 2024). Kondisi ini sejalan dengan temuan Suratman dkk. (2025) yang menyimpulkan bahwa meskipun media sosial lebih sering digunakan karena akses yang cepat dan mudah, informasi yang beredar di dalamnya dinilai kurang dapat dipercaya akibat maraknya konten tidak valid, sehingga justru memperburuk persepsi publik terhadap institusi yang menjadi objek pemberitaan.

Fenomena viralnya konten begal di media sosial tidak dapat dipandang sebelah mata dalam konteks kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Penurunan kepercayaan publik dapat meningkatkan risiko konflik sosial, ketidakpuasan, dan instabilitas politik, sementara kepercayaan yang tinggi mendorong masyarakat untuk lebih mendukung kebijakan institusi dan mematuhi aturan yang berlaku (Tri Haryadi dkk., 2025). Legitimasi kepolisian pun tidak hanya ditentukan oleh legalitas formal, tetapi oleh keselarasan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, di mana dinamika opini publik di media

menjadi salah satu faktor yang secara langsung memengaruhi legitimasi tersebut (Purba dkk., 2026). Paparan konten yang bersifat negatif dan tidak berimbang terbukti cenderung menurunkan persepsi kepercayaan publik (Efendi & Ramadhani, 2024), dan kepercayaan terhadap polisi sendiri pada akhirnya hanya dapat diperoleh bila kepolisian memberi perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat (Putri, 2023).

Pada tataran nasional, kondisi kepercayaan publik terhadap Polri menunjukkan gambaran yang memprihatinkan. Polri mengalami penurunan tingkat kepercayaan publik secara konsisten selama lima tahun berturut-turut dari 2021 hingga 2025, dengan tingkat kepercayaan yang semula mencapai 80 persen pada 2021 terus menurun hingga survei terakhir pada 2025 (Indikator Politik Indonesia, 2025). Lebih lanjut, hanya 34,4 persen responden yang mengaku percaya bahwa polisi merupakan institusi yang bersih, profesional, dan mengayomi, sementara sekitar dua dari tiga orang Indonesia mengaku pernah mengalami pengalaman buruk saat berurusan dengan polisi dalam dua tahun terakhir (GoodStats, 2025).

Kondisi ini semakin relevan ketika dikaitkan dengan temuan bahwa penggunaan konten media sosial terkait kepolisian terbukti memiliki hubungan langsung dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri (Efendi & Ramadhani, 2024). Namun kondisi kepercayaan yang ideal sulit terwujud ketika narasi di media sosial justru terus-menerus menggambarkan ketidakmampuan kepolisian menangani kejahatan begal di Kota Medan.

Berdasarkan kesenjangan antara kondisi ideal dan realita tersebut, terlihat jelas bahwa budaya viral di media sosial terkait kasus begal di Kota Medan telah menciptakan persoalan serius bagi kepercayaan publik terhadap kepolisian. Meskipun sejumlah penelitian telah mengkaji hubungan media sosial dengan persepsi terhadap institusi penegak hukum, kajian yang secara spesifik mengukur pengaruh konten digital terhadap kepercayaan publik pada kepolisian dalam konteks kasus begal di Kota Medan masih sangat terbatas. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan tiga tujuan utama: (1) menganalisis pengaruh konten viral terkait begal

terhadap kepercayaan publik pada kepolisian; (2) mengkaji peran media sosial dalam memperkuat atau memperlemah legitimasi kepolisian; dan (3) mengidentifikasi perbedaan tingkat kepercayaan publik antara masyarakat yang terpapar konten digital secara intens dengan yang tidak atau jarang terpapar di Kecamatan Medan Tembung.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif (Sugiyono, 2019). Lokasi penelitian adalah Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, yang menduduki peringkat pertama (Zona Merah) sebagai wilayah dengan kasus begal tertinggi di Kota Medan periode 2022–2024. Populasi adalah seluruh warga Kecamatan Medan Tembung yang aktif menggunakan media sosial dan pernah terpapar konten digital terkait kasus begal. Sampel sebanyak 100 responden ditentukan menggunakan teknik purposive sampling (Sugiyono, 2019:85) dengan kriteria inklusi: warga berdomisili tetap di Kecamatan Medan Tembung, pengguna aktif platform digital (TikTok, Instagram, X/Twitter, atau

Facebook), dan pernah mengonsumsi konten digital terkait kasus begal di Medan Tembung pada kurun waktu 2023–2024.

Data primer dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur menggunakan Skala Likert 1–5 yang mengukur tiga dimensi: intensitas konsumsi konten digital (8 indikator, X1–X8), persepsi atas kinerja kepolisian, dan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi hukum (8 indikator, Y1–Y8). Data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Teknik analisis data meliputi analisis deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, regresi linear sederhana, uji t, dan independent sample t-test untuk menguji perbedaan tingkat kepercayaan berdasarkan intensitas paparan konten.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Karakteristik Responden

Sampel terdiri atas 100 responden dengan distribusi relatif berimbang antara laki-laki (51%) dan perempuan (49%). Sebaran usia merata pada kelompok usia produktif 20–44 tahun, dengan dominasi 25–29 tahun (23%). Mayoritas berpendidikan SMA/SMK (32%), diikuti D3 (28%) dan

S1 (25%). Kombinasi TikTok dan X menjadi platform paling dominan (19%), konsisten dengan posisi TikTok sebagai platform terpopuler di Indonesia. Sebesar 30% responden menggunakan media sosial lebih dari 4 jam per hari, mengisyaratkan potensi paparan konten yang sangat tinggi.

Uji Instrumen

Uji validitas menggunakan korelasi Pearson Product Moment ($n = 100$, r tabel = 0,1966, $\alpha = 0,05$) menunjukkan seluruh 16 butir instrumen (X1–X8 dan Y1–Y8) valid dengan nilai r hitung jauh melampaui r tabel ($p = 0,000$). Uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha menghasilkan nilai Variabel X sebesar 0,903 dan Variabel Y sebesar 0,730, keduanya di atas standar minimum 0,700. Dengan demikian, seluruh instrumen dinyatakan valid dan reliabel.

Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar Minimum	Keterangan

Variabel X (Konten Digital)	0,903	>0,700	Reliabel
Variabel Y (Kepercayaan Publik)	0,730	>0,700	Reliabel

Sumber: Data primer diolah peneliti, 2026

Analisis Deskriptif Variabel

Rata-rata skor Variabel X (Konten Digital) sebesar 3,175 (SD = 0,893) berada dalam kategori Sedang, dengan indikator tertinggi pada Durasi Menonton ($X_2 = 3,29$) dan terendah pada Diskusi Online ($X_8 = 2,98$). Distribusi kategoris menunjukkan 36% responden dalam kategori Paparan Tinggi, 40% Paparan Sedang, dan 24% Paparan Rendah. Variabel Y (Kepercayaan Publik) memperoleh rata-rata 1,916 (SD = 0,445) yang masuk kategori Rendah—sebanyak 83% responden berada dalam kategori Kepercayaan Rendah dan tidak ada satu pun responden yang masuk kategori Kepercayaan Tinggi. Indikator Kecepatan Penanganan ($Y_1 = 1,86$) dan Transparansi ($Y_5 = 1,88$) memperoleh nilai terendah.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Per Indikator Variabel X dan Y

Kode	Indikator	Mean	SD	Kategori
X1	Frekuensi Akses	3,21	1,233	Sedang
X2	Durasi Menonton	3,29	1,233	Sedang
X3	Jenis Konten Video	3,25	1,209	Sedang
X4	Jenis Konten Komentar	3,23	1,238	Sedang
X5	Sentimen Negatif	3,08	1,070	Sedang
X6	Viralitas Konten	3,22	1,124	Sedang
X7	Share Konten	3,14	1,110	Sedang
X8	Diskusi Online	2,98	1,005	Sedang
Y1	Kecepatan Penanganan	1,86	0,766	Rendah
Y2	Rasa Aman	1,97	0,731	Rendah
Y3	Profesionalisme	1,94	0,736	Rendah
Y4	Integritas	1,88	0,756	Rendah
Y5	Transparansi	1,88	0,729	Rendah
Y6	Respons Laporan	1,97	0,784	Rendah
Y7	Patroli Rutin	1,95	0,770	Rendah

Kode	Indikator	Mean	SD	Kategori
Y8	Kepercayaan Keseluruhan	1,88	0,782	Rendah

Sumber: Data primer diolah peneliti, 2026

Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana menghasilkan persamaan: $\hat{Y} = 3,226 - 0,413X$. Koefisien regresi negatif ($b = -0,413$) menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan intensitas paparan konten digital diikuti penurunan kepercayaan publik sebesar 0,413 satuan. Koefisien korelasi $R = -0,827$ menunjukkan hubungan yang kuat dan negatif. Nilai $R^2 = 0,684$ mengindikasikan bahwa 68,4% variansi kepercayaan publik dapat dijelaskan oleh konten digital. Nilai t hitung = $-14,576$ ($p = 0,000 < \alpha = 0,05$) lebih besar dari t tabel = 1,984, sehingga H_1 diterima.

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Keterangan	Koefisien (B)	t hitung	Sig. (p)
Konstanta (a)	3,226	33,618	0,000

Keterangan	Koefisien (B)	t hitung	Sig. (p)
Konten Digital (X)	-0,413	-14,576	0,000
R	-0,827	—	—
R Square (R ²)	0,684	—	—

Sumber: Data primer diolah peneliti, 2026

Pengujian Hipotesis

Pengujian H1 melalui uji t menunjukkan nilai t hitung = -14,576 ($p = 0,000$) melampaui t tabel = 1,984, sehingga H1 diterima: konten digital terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepercayaan publik pada kepolisian dalam kasus begal di Kecamatan Medan Tembung. Pengujian H2 dilakukan melalui triangulasi hasil regresi dan analisis deskriptif—fakta bahwa 83% responden berada dalam kategori kepercayaan rendah di tengah intensitas paparan konten digital sedang hingga tinggi pada 76% responden, disertai korelasi negatif kuat $R = -0,827$, mengkonfirmasi bahwa media sosial melalui mekanisme agenda setting dan framing negatif telah secara nyata melemahkan legitimasi kepolisian. H2 diterima secara empiris. Pengujian H3

menggunakan independent sample t-test menunjukkan perbedaan signifikan antara kelompok Paparan Tinggi ($n = 36$, Mean $Y = 1,465$) dengan Paparan Rendah ($n = 24$, Mean $Y = 2,490$), dengan t hitung = -24,880 ($p = 0,000$) melampaui t tabel = 2,002, sehingga H3 diterima.

Tabel 4. Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

H	Pernyataan Hipotesis	Hasil Uji Statistik	p-value	Keputusan
H 1	Konten digital berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepercayaan publik	$t = -14,576$ $> t \text{ tabel} = 1,984$; $R = -0,827$; $R^2 = 0,684$	0,000	Diterima
H 2	Media sosial memperlemah legitimasi kepolisian dalam penanganan	83% kepercayaan rendah; $R = -0,827$	Triangulasi	Diterima

H	Pernyataan Hipotesis	Hasil Uji Statistik	p-value	Keputusan
	an kasus begal			
H3	Perbedaan kepercayaan signifikan antara kelompok paparan tinggi dan rendah	t = -24,880 > t tabel = 2,002; Mean Tinggi=1,4 65 vs Rendah=2,490	0,000	Diterima

Sumber: Data primer diolah peneliti, 2026

Pembahasan

Temuan penelitian ini dapat dipahami melalui mekanisme agenda setting dan framing digital. Algoritma platform TikTok dan X yang digunakan mayoritas responden cenderung memprioritaskan konten bernilai emosional tinggi, sehingga narasi negatif mengenai kepolisian lebih mudah menyebar dan secara kumulatif membentuk persepsi negatif terhadap institusi (Khatimah dkk., 2024). Nilai $R^2 = 0,684$ mengindikasikan bahwa 31,6%

variansi kepercayaan publik kemungkinan dipengaruhi faktor lain yang tidak diukur dalam penelitian ini, seperti pengalaman langsung dengan kepolisian, konsumsi media konvensional, atau latar belakang sosial ekonomi.

Berkenaan dengan legitimasi kepolisian, temuan penelitian menunjukkan bahwa media sosial berperan sebagai faktor yang memperlemah legitimasi institusi. Dalam kerangka grand theory kepercayaan institusional, kondisi ini mencerminkan terganggunya keselarasan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum akibat dominasi narasi negatif (Purba dkk., 2026). Fenomena viral justice yang diidentifikasi Wuysang dkk. (2024) semakin memperparah kondisi ini, di mana masyarakat menggunakan media sosial sebagai platform penuntutan alternatif terhadap kepolisian yang dinilai lambat dan kurang responsif.

Perbedaan yang sangat besar antara Mean Y kelompok paparan tinggi (1,465) dan paparan rendah (2,490) menegaskan bahwa intensitas konsumsi konten digital secara kumulatif membentuk persepsi yang

semakin negatif terhadap kepolisian. Paradoks yang ditemukan Suratman dkk. (2025), di mana publik tetap membiarkan konten yang tidak sepenuhnya mereka percaya membentuk penilaian terhadap institusi, menunjukkan betapa kuatnya mekanisme framing dalam memengaruhi sikap publik. Ramadhani (2024) menegaskan bahwa tanpa strategi komunikasi digital yang proaktif dari kepolisian, siklus erosi kepercayaan ini berpotensi terus berkembang.

D. Kesimpulan

Pertama, konten digital terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepercayaan publik pada kepolisian dalam kasus begal di Kecamatan Medan Tembung ($\beta = -0,413$; $R = -0,827$; $R^2 = 0,684$; $t_{\text{hitung}} = -14,576$; $p < 0,001$), sehingga H1 diterima. Sebesar 68,4% variansi kepercayaan publik dapat dijelaskan oleh intensitas paparan konten digital. Kedua, media sosial terbukti berperan memperlemah legitimasi kepolisian secara nyata dalam penanganan kasus begal di Kota Medan (H2 diterima)—fakta bahwa 83% responden berada dalam kategori kepercayaan rendah mengonfirmasi

terjadinya erosi legitimasi institusional yang bersifat sistemik. Ketiga, terdapat perbedaan tingkat kepercayaan publik yang signifikan secara statistik antara kelompok masyarakat dengan paparan konten digital tinggi dan rendah (Mean Y Paparan Tinggi = 1,465 vs. Paparan Rendah = 2,490; $t_{\text{hitung}} = -24,880$; $p < 0,001$), sehingga H3 diterima.

Berdasarkan temuan tersebut, institusi Kepolisian Kota Medan perlu membangun unit komunikasi publik digital yang terencana, konsisten, dan berbasis bukti dengan secara aktif memanfaatkan TikTok dan X untuk mengkomunikasikan capaian penanganan kasus begal dan transparansi proses hukum. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mendorong peningkatan literasi digital yang lebih kritis dalam mengonsumsi konten terkait isu keamanan. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan mengadopsi desain longitudinal, memperluas lokasi penelitian, serta menambahkan variabel moderasi dan mediasi ke dalam model.

DAFTAR PUSTAKA

ANTARA News. (2024, 31 Mei). Polisi tangkap dua terduga pelaku

- begal di Medan. <https://www.antaranews.com/berita/4131360/polisi-tangkap-dua-terduga-pelaku-begal-di-medan>
- Buka Mata. (2024, 19 September). Pemuda dibegal di Kota Medan, netizen soroti kinerja polisi. <https://www.bukamata.co/hukum/50576553/pemuda-dibegal-di-kota-medan-netizen-soroti-kinerja-polisi-berikut-beragam-komentar-warganet>
- DataReportal. (2026). Digital 2026: Indonesia. <https://datareportal.com/reports/digital-2026-indonesia>
- Efendi, I., & Ramadhani, N. (2024). Penggunaan media sosial X pada akun @Txtdrberseragam untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat Yogyakarta terhadap Kepolisian RI. *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(3), 236–248.
- Efendi, E., Taufiqurrohman, A., Supriadi, T., & Kuswananda, E. (2023). Teori agenda setting. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 1715–1718.
- GoodStats. (2025). Survei penilaian pengalaman masyarakat terhadap pelayanan polisi tahun 2025. <https://goodstats.id/article/survei-goodstats-2025>
- Indikator Politik Indonesia. (2025). Tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara. Jakarta: Indikator Politik Indonesia.
- Indonesia Indicator (I2). (2024). Tren media sosial di Indonesia 2024. Jakarta: Indonesia Indicator.
- Khatimah, K., et al. (2024). Media sosial dan opini publik: Agenda setting, framing, dan hegemoni di era digital. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(9).
- Koestiono, F., Hapsari, A. P., Permadi, R., Muchlis, M., & Metalia, D. (2025). Pengaruh media sosial terhadap pembentukan opini publik tentang hukum. *Jurnal ISO*, 6(1), 10.
- Purba, R. M., Suseno, J. J. B., et al. (2026). Strategi Polri dalam penegakan hukum humanis untuk meningkatkan kepercayaan publik di

- Kepulauan Riau. Jurnal USM Law Review, 9(1).
- Putri, A. M. (2023). Kajian sosiologi hukum tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Universitas Sebelas Maret.
- Ramadhani, M. (2024). The important role of social media in improving the performance of law enforcement apparatus in Indonesia. Journal of Legal and Cultural Analytics, 3(3), 299–310.
- Suratman, A., Salsabila, N., et al. (2025). Tingkat kepercayaan publik dalam mengonsumsi berita melalui media sosial vs media konvensional. Jurnal ISO, 5(1).
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tri Haryadi, A., et al. (2025). Pengaruh media sosial terhadap kepercayaan publik pada institusi pemerintah. Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner (JPIM), 02(04), 2500–2510.
- Wise, R. A., Mayer, R. C., & Mourtgos, S. M. (2025). Police–public trust: Toward a more complete perspective. Behavioral Science & Policy, 11(2).
- Wuysang, J. M., et al. (2024). Viral justice: Law enforcement in the social media era. Nurani.
- Zaidi, H., & O'Connor, C. D. (2024). Policing social media: Are procedural justice principles guiding Canadian police interactions online? The Police Journal, 96(3–4), 327–348.